



MANUAL IKU

PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA SIBOLGA
2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga Tahun 2024. Penyusunan Manual IKU merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memenuhi sasaran strategis PPN Sibolga Tahun 2024. Diharapkan dengan disusunnya Manual IKU ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja PPN Sibolga dalam melaksanakan aktivitas pengukuran dan pengisian capaian kinerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Manual IKU PPN Sibolga Tahun 2024. Semoga bermanfaat dalam mendukung capaian kinerja PPN Sibolga Tahun 2024.

Padang, Januari 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga



Makkasau, A.Pi, M.Si

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 lingkup UPT

No	IKU	Periode	Pola Perhitungan
Teknis			
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Triwulan	Nilai Posisi Akhir
2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Triwulan	Nilai Posisi Akhir
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Tahunan	Nilai Posisi Akhir
4	Tingkat Kinerja pelabuhan perikanan Nusantara Sibolga	Triwulan	Rata-rata
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Tahunan	Nilai Posisi Akhir
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Tahunan	Nilai Posisi Akhir
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Triwulan	Rata-rata
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Triwulan	Nilai Posisi Akhir
9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Pelindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir
Dukungan Manajerial			
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Tahunan	Nilai Posisi Akhir
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Triwulan	Nilai Posisi Akhir
12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Tahunan	Nilai Posisi Akhir
13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Semester	Nilai Posisi Akhir
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Semester	Nilai Posisi Akhir
17	Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	tahunan	Nilai Posisi Akhir
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	triwulan	Nilai Posisi Akhir



IKU 01. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan : Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU : Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi :
 - Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
 - Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
- Formula Perhitungan : Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan



Satuan Pengukuran

Juta Rupiah



Tingkat Validitas

Output Kendali
Rendah



Sumber Data

Tim Kerja
TKPU



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

2.382,80



IKU 02. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan : Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga meningkat
- Nama IKU : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi : Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.
- Formula Perhitungan : $Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$

Keterangan:

$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut

$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I

Nilai TW II = capaian TW I + TW II

Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III

Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV



Satuan Pengukuran

Ton



Tingkat Validitas

Outcome



Sumber Data

Tim Kerja
Operasional Pelabuhan



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

31.451



IKU 03. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang berdaya saing
- Nama IKU : Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi :
 - Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan.
 - Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNPB yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.
- Formula Perhitungan : **Indikator I :**
$$\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total Jumlah Usulan Perusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus}} \times 80\%$$

Indikator II :
Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %
Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator 2



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja
TKPU



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

100



IKU 04. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang berdaya saing

Nama IKU : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Definisi : Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan :

$$NK = \frac{\text{Bobot}(A) \times \text{Skala}(S)}{4}$$

Keterangan :

1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:

Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali rendah



Sumber Data

Tim Kerja
Operasional Pelabuhan



Pola Perhitungan

Rata-Rata



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

84



IKU 05. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang berdaya saing
- Nama IKU** : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Merupakan indikator yang menunjukkan:
1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)
 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
- Formula Perhitungan** :
1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ... (x1)
 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2)
 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 - [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]..... (x3)

$$\text{Tingkat Pelayanan} = x1 + x2 + x3$$



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja
Kesyahbandaran



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

76



IKU 06. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang optimal
- Nama IKU** : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
- Formula Perhitungan** :
$$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$$



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali rendah



Sumber Data

Tim Kerja TKPU



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

75



IKU 07. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang optimal
- Nama IKU : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.
 - SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk score Pelabuhan.

Formula Perhitungan : **Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)**
Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)

Kategori

Kurang : 0-30

Cukup : >30-60

Baik : >61 - 80

Sangat Baik : >81 – 100

Keterangan:

Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)

Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja TKPU



Pola Perhitungan

Rata - Rata



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

30,10



IKU 08. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
- Definisi** : Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Formula Perhitungan** : Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, dengan ketentuan target tahun berjalan ditambah dengan capaian tahun sebelumnya.

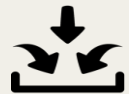
Keterangan:

Capaian TW I : Capaian 2023 + Capaian TW I;

Capaian TW II : Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II;

Capaian TW III : Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II + TW III;

Capaian TW IV : Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II + TW III + TW IV;



Satuan Pengukuran

Kapal



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja
Kesyahbandaran



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

493



IKU 09. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan
- Definisi** : Merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
- Formula Perhitungan** :
$$\frac{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi di PPN Sibolga}}{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL di PPN Sibolga}} \times 100\%$$



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja
Kesyahbandaran



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

11



IKU 10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (nilai)

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga (nilai)
- Definisi** : Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas PPN Sibolga yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
- Formula Perhitungan** : Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas PPN Sibolga, yang terdiri dari Komponen pengungkit 60% (Manajemen Perubahan 5%; Penataan Tatalaksana 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%; Penguatan Pengawasan 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%) Komponen Hasil 40%



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

80



IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Nama IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan

Formula Perhitungan : $RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan

$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT

Satuan Pengukuran



Persen

Tingkat Validitas



Output kendali tinggi

Sumber Data



Tim Kerja Dukungan Manajerial

Pola Perhitungan



Nilai Posisi akhir

Polarisasi



Maximize

Periode Pelaporan



Triwulanan

Metode Cascading



Buat Baru

Target



80



IKU 12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%)
- Formula Perhitungan** : Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

94



IKU 13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Formula Perhitungan** : Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).



Satuan Pengukuran

Indeks



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Semesteran



Metode Cascading

Buat Baru



Target

84



IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Formula Perhitungan** : Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:
- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
 - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
 - Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
 - Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

80



IKU 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Formula Perhitungan** : Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:
- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
 - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
 - Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2022 (bobot 20%);
 - Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
 - Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Satuan Pengukuran



Persen

Tingkat Validitas



Output kendali tinggi

Sumber Data



Tim Kerja Dukungan Manajerial

Pola Perhitungan



Nilai Posisi akhir

Polarisasi



Maximize

Periode Pelaporan



Tahunan

Metode Cascading



Buat Baru

Target



80



IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Formula Perhitungan** : Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Semesteran



Metode Cascading

Buat Baru



Target

93,76



IKU 17. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya
- Formula Perhitungan** : Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Aats Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

86



IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

- Sasaran Kegiatan** : Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Nama IKU** : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
- Definisi** : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- Formula Perhitungan** : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP

Satuan Pengukuran



Indeks

Tingkat Validitas



Output kendali tinggi

Sumber Data



Tim Kerja Dukungan Manajerial

Pola Perhitungan



Nilai Posisi akhir

Polarisasi



Maximize

Periode Pelaporan



Triwulanan

Metode Cascading



Buat Baru

Target



88,30